

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA M E D A N

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH: Hukum Tata Negara | KODE MATA KULIAH: 010203208 | RUMPUN MATA KULIAH: K eprodian | BOBOT (SKS): 2 SKS | SEMESTER: 4 | TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Agustus 2023 | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| OTORISASI | DOSEN PENGEMBANG RPS: Dr. Afifah Rangkuti, , SH, M.Hum | KOORDINATOR RMK: Dr. Khalid, S.Ag., SH., M | ı I.Hum | I | Kaprodi Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN Catatan: | CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlianny Mampu mengintegrasikan keilmuan dan teori-teori Hukum Tata Negara; Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inova pengembanganatau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkannilaihumaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu berkomunikasi secara efektif dalam hal penyelesaiar hukumkhususnyadalam hal perkembangan ketatanegaraan | | | | |
| | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | Mahasiswa rnampum Mahasiswamampum dalamhukumtatanega Mahasiswamampum dariperspektif HTN; | nemahamidanmenjelas emahami penge ara; emahamimengenaigej | kankonsep-konse rtian, penge ala-gejala ken | ami tentang hukumtata negara; epkenegaraan elompokan dan istilah egaraan dan pemerintahan n perkembangan ketatanegaraan | |

| DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: | Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian, pemahaman yang komprehensif tentangpengertianilmu hukum tata negara dan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, hakikat hukumtatanegara, sumber-sumber hukum tata negara, teori konstitusi, perkembangan UUD1945, konsepsi negarahukum dan demokrasi, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara berdasarkan sistemketatanegaraanIndonesia, sistem pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. |
|--|---|
| MATERI PEMBELAJARAN/ POKOK BAHASAN | Efektivitas Penerapan Mata Kuliah Kurikulum KKNI dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Tata Negara pada Program Studi Hukum Tata Negara Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Kerangka Hukum, Peristilahan, Pengertian, ObyekdanMetodeHukum Tata Negara,. Hubungan Hukum Tata Negara dengan cabang-cabang hukumlainnya |
| | Sumber Hukum Tata Negara, Konstitusi; a. Sejarah Konstitusi ,b. Arti dan Pengertian Konstitusi ,c. Klasifikasi Konstitusi, d. Tujuan dan Hakikat Konstitusi ,e. Perubahan Konstitusi Konsep-konsep Dasar Ketatanegaraan (Konstitusionalisme) Teori kedaulatan dan Ideologi Negara Susunan Negara dan Organisasi Pemerintahan Struktur, Organ,dan fungsi Lembaga Penyelenggara Kekuasaan Negara |
| PUSTAKA | UTAMA 1. Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,1985; 2. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpress, Jakarta, 2005; 3. Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006; 4. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Konpress, Jakarta, 2006. |
| | PENDUKUNG 1. UUD 1945 dan Perubahannya 2. UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM 3. UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 5. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Powerpoint, MS Word, White Board, Buku Refrensi |
| TEAM TEACHING | - |
| MATA KULIAH SYARAT | - |
| | |

| MINGGU KE | SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|--|--|--|------------------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1-5 | Mahasiswa mampu memahami disiplin dan ruang lingkup hukum tata negara dan Efektivitas Penerapan Mata Kuliah Kurikulum KKNI dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Tata Negara pada Program Studi Hukum Tata Negara | Mengerti dan mampu menjelaskan apa itu hukum tata negara, batasannya, objek dan ruang lingkupnya secara umum | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Ceramah& Diskusi | Pengertian, Istilah, obyek hukumtatanegara; Ruang lingkuphukumtata negara | 5% |
| | Mahasiswa mampu memahami tentang hubungan hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya | Mengerti dan mampu menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan ilmu sosial dan politik | Kriteria:Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Ceramah& Diskusi | Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara; Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara; Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional dan Hubungan hukum tata negara dengan ilmu sosial dan politik | 10% |
| | Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang sumber-sumber hukum tata negara, | mengerti dan mampu menjelaskan apa itu sumber hukum formil dan sumber hukum materil dan | Kriteria:Ketepatan danPenguasaan materi | Tatap Muka Diskusi | - Pengertian sumber hukum tata negara; a. sumber hukum formil b. sumber hukum materil | 5% |

| MINGGU KE | SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | khususnya konstitusi sebagai sumber utama HTN | macam macam sumber hukum tata negara | Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Tanya Jawab | Macam-macam sumber HTN; a. Aturan hukumtertulis b. Konvensi Ketatanegaraan Konstitusi sebagai sumber utama HTN | |
| | Mahasiswa mampu memahami konsep- konsep dasar ketatanegaraan (konstitusionalism) | Mengerti dan mampu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ketatanegaraan | Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non - test:Presentasi & Diskusi | Tatap Muka Tanya Jawab | Negara hukum(rechstaat) /supremasi hukum(rule of law) Perlindungan HAM& kelompokminoritas Pemisahan/Pembagi an/pemencaran kekuasaan negara Demokrasi Prinsip-prinsip pemerintahan yangbaik (goodgovernance pinciples) | 5% |
| 6-7 | Mahasiswa mampu memahami teori kedaulatan dan ideologi negara sebagai sumber kekuasaan negara | Mengerti dan mampu menjelaskan apa saja yang dikategorikan sebagai kedaulatan negara (state sovereignty) dan ideologi negara | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Tatap Muka Ceramah Tanya Jawab | - Ajaran-ajaran kedaulatan; a.Kedaulatan Tuhan b. Kedaulatan Raja c. Kedaulatan Rakyat d.Kedaulatan Negara e.Kedaulatan Hukum | 20% |

| MINGGU KE | SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) - Ideologi Negara a. Sosialisme b. Komunisme c. Liberalisme d. Nasionalisme e. Agamis | (7) |
| 8 | Ujian CPMK 1 & 2 | | | | | |
| 9-12 | Mampu memahami mengenai susunan negara dan organisasi pemerintahan | Mengerti dan mampu menjelaskan struktur kekuasaan, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan mampu menjelaskan berbagai corak pemerintahan (sumber kekusaan) | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Tugas Terstruktur Mandiri | 1. Struktur kekuasaan | 10% |

| MINGGU KE | SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|---|--|--|---|--|--------------------|
| (1) | (2) Mampu memahami tentang struktur, organ, & fungsi lembaga penyelenggara kekuasaan negara | (3) Mengerti dan mampu menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara (lembaga- lembaga negara utama) | (4) Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | (5) Ceramah Tanya Jawab Small group discussion | (6) 1. Horisontal (cabang-cabang kekuasaannegara); - Pemisahan kekuasaan - Pembagian kekuasaan - Pemencarankekuasaan 2. Vertikal (berjenjang) - Lembaga pemerintah - Angkatan bersenjata - Lembaga Peradilan | (7) 5% |
| | Mampu memahami tentang Lembaga/Badan Perwakilan Rakyat | Mengerti dan mampu menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan pembagian dalam parlemen dan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana rekruitmen anggota lembaga/badan perwakilan rakyat (melalui Pemilu) | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Tugas terstrukstur Kelompok | 1. Lembaga/Badan Perwakilan Rakyat; a. Pengertian Lembaga/BadanPerwakilan Rakyat b. Fungsi Lembaga/BadanPerwakilan Rakyat c. Kamar dalamParlemen: Uni- kameral (unicameral)- Bikameral (bicameral) 2. Rekruitmen AnggotaLembaga/badan perwakilan Rakyat (melalui Pemilu) a. Pengertian,fungsi ,tujuan pemilu b. SistemPemilu c. SistemKepartaian: Peserta Pemilu- Partai politik Independen/Nonparpol | 10% |

| MINGGU KE | SUB CPMK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN) | INDIKATOR | KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN | METODE PEMBELAJARAN | MATERI PEMBELAJARAN | BOBOT PENILAIAN |
|--------------|--|---|--|---|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| 13-15 | Mampu memahami materi mengenai lembaga yudisial | Mengerti dan mampu menjelaskan pengertian,pembidanga n,penjenjangan kekuasaan kehakiman, | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Ceramah Small Group Discussion | menjelaskan Dasar hukum dan macam-macam eksepsi | 10% |
| | Macam-macam kompetensi pengadilan pidana Pengertian dan jenis koneksitas Acara pemeriksaan sidang pengadilan | Ketepatan menjelaskan tentang Pengertian dan jenis koneksitas Ketapatan menjelaskan tentang Macammacam kompetensi pengadilan pidana Ketepatan menjelaskan tentang Acara pemeriksaan sidang pengadilan | Kriteria:Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk nontest:Presentasi& Diskusi | Cooperative learning Guided learning Klarifikasi | 1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 2. Pembidangan kekuasaan Kehakiman - Publik - Privat - Agama - Militer 3. Penjenjangan Kekuasaan Kehakiman; - Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Banding - Mahkamah Agung 4. Mahkamah Konstitusi | 20% |
| 16 | Ujian CPMK 3 & 4 | | | | | |

Komponen Penilaian

| Aspek | Persentase |
|--------------|------------|
| Ujian CPMK 1 | 25% |
| Ujian CPMK 2 | 20% |

| Ujian CPMK 3 | 25% |
|--------------|------|
| Ujian CPMK 4 | 30% |
| Total | 100% |

Ketentuan lain: Kehadiran mahasiswa minimal 75% dan seluruh tugas dikumpulkan.

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: | | Disahkan oleh: |
|----------------------------------|--|----------|----------------|
| Dosen Pengampu | Penanggungjawab Keilmuan Ketua Program Studi | | Dekan |
| | | S Alfans | |
| Dr. Afifah Rangkuti, , SH, M.Hum | Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.F | | |